

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007;
- _____(2), *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016;
- Agustinus Pohan, *et.al, Pengembalian Aset Kejahatan*, Yogyakarta: Pusat Kajian Korupsi Fakultas UGM dan Kemitraan, 2008;
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education, 2012;
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- _____(2), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007;
- Bagir Manan dan Susi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014;
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017;
- _____(2), *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Keaddilan Vol. 5 No. 1, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011;
- Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Bandung: Books Terrace & Library, 2009;
- Booz Allen Hamilton, *Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Order*, Washington D.C: National Institute of Justice of United State Department of Justice, 2011;
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007;
- Chaeruddin, *Strategi Pencegahan Hukum dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008;
- Charles Doyle, *Crime and Forfeiture*, Prepared for Member and Comttees of Congresss in *Congressional Research Service (CRS Report)*, Tanggal 22 Januari 2015;
- Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi "Kajian Anti Korupsi Teoridan Praktek"*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2016;
- David Fredriek Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013;

- David Torrance, *Evidence of Character in Civil and Criminal Proceedings*, *Yale Law Journal*, Heinonline-12 Y.L.J. 352 1902-1903;
- Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004;
- _____ (2), *Non-Conviction Based Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceeds in Indonesia*, *Jurnal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume IX, Issue 1(31), 2018;
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002;
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill Co, 2002;
- H. Patrick Glenn, *Legal Traditions of the World*, New York: Oxford University Press, 2010;
- H.R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012;
- Hangkoso Satrio, *Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum, 2012;
- I. Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative: Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara*, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, Januari 2008;
- Ian Smith, Tim Owen, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003;
- Irwansyah, & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020);
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007;
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015;
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003;
- Jean Pierre Brun, *et.al*, *Asset Recovery Handbook: A Guide of Practioners*, Washington D.C: *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank*, 2011;
- July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara*, *Jurnal UIR Law Review* Vol. 01, No. 01, Riau 2017;
- Kevin M. Stephenson, Larissa Gray, *et.al*, *Barriers to Asset Recovery An Analysis of the Key Barriers an Recommendations for Action*, Washington D.C: *The International Bank Reconstruction and Development/World Bank*, 2011;

- Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016;
- Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP35, 1998;
- Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, Cetakan 1, 2013;
- Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum Vol. 6 No. 1, Juni 2015;
- Mardjono Reksodiputro, *Memiskinkan Koruptor*, Makalah pada Seminar Nasional “*National Moot Court Competition*” Piala Jaksa Agung III, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta: 18 Desember 2012;
- Matthew P. Harrington, *Rethinking in Rem: The Supreme Court’s New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture*, *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2, 1994;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieka Cipta, 2015;
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992;
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014;
- PPATK, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005;
- _____(2), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008;
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008;
- Ramelan, *Penyelesaian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012;
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: CV. Malibu, 2012;
- Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Ilmu hukum 3 No. 1 2017;

- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001;
- Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2 2016;
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003;
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018;
- Supomo, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Pradoyo Paramita, Cetakan ke 17, 2005;
- Tamara R. Piety, *Scorched Earth: How the Expansion of Civil Forfeiture Doctrine has Laid Waste to Due Process*, *University of Miami Law Review*, Volume 45, No. 911, 1991;
- Teuku Isra Muntahar, *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020;
- Theodore S. Greenberg, dkk, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: The World Bank, 2009;
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010;
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006;
- Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4, Desember 2010;
- _____(2), *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010.

Website

- <https://acch.kpk.go.id>
<https://nasional.kompas.com>
<https://jdih.kemenkeu.go.id>

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang No, 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana;

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC